

**PEMBERDAYAAN PENGRAJIN KAIN TENUN SUTERA DI DESA PAKKANNA
KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO**

Asrina

NPP. 31.0820

Asdaf Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Email: asrina.as25@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dra. Hj. Riani Bakri, M.Si

ABSTRACT

Problem / Background (GAP): This research discusses the empowerment of silk woven fabric craftsmen which is the typical and most famous characteristic in Wajo district, especially Pakkanna village. Silk woven fabric improves community welfare because most of the people in Pakkanna Village make silk their livelihood. Therefore, silk must continue to be developed and empowered by the community and government, especially the Department of Industry, Trade, Cooperatives, MSMEs. **Purpose:** The aim of this research is to determine and analyze the empowerment of silk woven fabric craftsmen carried out by the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises in Pakkanna Village, Tanasitolo District. describes the empowerment carried out, inhibiting factors and efforts made to optimize the empowerment of silk woven fabric craftsmen. **Methods:** This research uses qualitative methods with data collection techniques of observation, interviews and documentation studies. This research was analyzed using Empowerment Theory from Mardikanto and Poerwoko. **Results:** The results of the research conducted show that empowering silk woven fabric craftsmen can encourage business actors to improve and develop their businesses by increasing productivity. In this research it is also known that the role of the government through the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises is very helpful and necessary for silk weaving MSMEs. However, there are still several obstacles, namely limited budgets, availability of raw materials, and the decline in the number of silk weaving craftsmen, as well as regulations governing grants and social assistance in the form of money originating from the APBD. **Conclusion:** Due to the fact that there are still obstacles in empowering silk woven fabric craftsmen in Pakkanna Village, Tanasitolo District, Wajo Regency, the government has taken several actions to overcome this by conducting training, establishing cooperation between the government and the community and arranging the budget for the development of silk woven fabric.

Keywords: Empowerment, Silk woven fabric craftsmen, Disperindagkop

ABSTRAK

Permasalahan / Latar Belakang (GAP): Penelitian ini membahas mengenai Pemberdayaan pengrajin Kain Tenun Sutra yang merupakan ciri khas dan paling terkenal di kabupaten Wajo khususnya Desa Pakkanna. Kain tenun sutera sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar masyarakat di Desa Pakkanna menjadikan sutera sebagai mata pengcahariannya. Oleh karena itu sutera harus terus dikembangkan dan diberdayakan oleh masyarakat dan pemerintah khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo. mendeskripsikan pemberdayaan yang dilakukan, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan Teori Pemberdayaan dari Mardikanto dan Poerwoko. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera dapat mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan meningkatkan produktifitas. Pada penelitian ini diketahui juga bahwa peran pemerintah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sangat membantu dan diperlukan dalam UMKM tenun sutera. Namun, masih terdapat beberapa kendala yaitu terbatasnya anggaran, ketersediaan bahan baku, dan menurunnya jumlah perajin tenun sutera, serta regulasi yang mengatur hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang yang berasal dari APBD. **Kesimpulan:** Dengan masih adanya penghambat dalam pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ini membuat pemerintah mengambil beberapa tindakan sebagai untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan pelatihan, menjalin kerjasama antar pemerintah dan masyarakat serta mengatur anggaran untuk pengembangan kain tenun sutera

Kata Kunci : Pemberdayaan, Pengrajin kain tenun sutera, Disperindagkop

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan kain sutera merujuk pada berbagai upaya untuk meningkatkan nilai dan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari produksi kain sutera, serta memberdayakan komunitas yang terlibat dalam industri kain sutera. Dalam proses pengembangannya masih mengalami berbagai tantangan baik faktor internal yang bersumber di dalam diri individu atau kelompok (sumber daya manusia) yang berlandaskan pada sistem hubungan sosial yang berlaku dalam masyarakat maupun faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan fisik (sumber daya lingkungan) yang mempengaruhi proses tumbuh dan bertahannya industri ini. Karena itu keputusan masyarakat menyesuaikan diri terhadap faktor eksternal yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk mekanisme perubahan. Dalam hal ini unsur-unsur internalnya tidak dapat sepenuhnya terlepas, namun diwarnai oleh unsur-unsur eksternal yang telah menyebabkan munculnya bentuk sistem perekonomian yang semakin kompleks.

Adanya potensi yang dimiliki perlu adanya pemberdayaan yang dilakukan. Menurut Parsons dalam

Edi Suharto (2017), pemberdayaan sebuah proses dimana individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi di berbagai pengontrolan atas dan berpengaruh terhadap beberapa kejadian serta lembaga-lembaga yang berpengaruh di kehidupannya. Pemberdayaan ditekankan pada keterampilan, kekuasaan, dan pengetahuan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan sendiri dan orang lain yang menjadi perhatian. Satu yang bisa diupayakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan cara memberdayakan industri yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan industri untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kontribusi langsung industri kecil terhadap pembangunan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja untuk proses produksi barang-barang. Pembangunan adalah setiap usaha yang dilakukan secara terorganisir untuk membawa suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kualitas dan kesejahteraan manusia. Pembangunan nasional juga dapat dilihat sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang disengaja yang difasilitasi oleh kebijakan dan strategi yang diarahkan ke arah yang diinginkan (Tikson, 2005). Pembangunan juga merupakan sebuah pandangan yang memandang kesejahteraan dapat terwujud apabila pelaku utama dalam pembangunan adalah berpusat pada rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan mencakup upaya terencana untuk membangun kapasitas dan potensi masyarakat serta memberikan bimbingan kepada kepentingan mereka untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan tentang masalah-masalah yang mempengaruhi mereka, dan mendorong potensi manusia daripada ketergantungan, membangun hubungan antara birokrasi negara dan masyarakat. Peran pemerintah terutama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam kapasitasnya untuk mengatur serta mengendalikan suatu usaha. ini sesuai dengan konsep upaya pemberdayaan industri kecil dan UKM salah satunya fungsi kelembagaan terkait pembinaan usaha kecil secara terpadu dan berjangka panjang harus lebih diefektifkan dengan cara bidang pembinaan, pengawasan dan memberi peluang bagi swasta maupun lembaga non pemerintah lainnya untuk terlibat dalam pengembangan usaha kecil secara bersama-sama.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang ada dikhawatirkan dapat menurunkan minat pada industri kain sutera. Mayoritas pemuda saat ini lebih memilih bekerja di perusahaan atau membuat usaha sendiri dikarenakan penghasilan yang lebih menjanjikan dan lebih mudah dilakukan. Hal ini membutuhkan perhatian dan peran dari pemerintah khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan produk yang telah menjadi ciri khas dari daerahnya agar tetap ada dan terlestarika.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Perkembangan zaman saat ini menyebabkan masyarakat mulai melupakan dan meninggalkan hal yang berbau tradisional. Salah satu contohnya di Kabupaten Wajo banyak dari masyarakat yang masih dalam golongan usia kerja produktif di Kabupaten Wajo yang tidak mau ikut serta dalam mengembangkan kain tenun sutera yang mana merupakan ciri khas dari kabupaten tersebut. Kebanyakan masyarakat sekarang beralih untuk memilih bekerja sendiri dengan membuka usaha onlineshop dikarenakan pendapatan yang lebih menjanjikan dan pengerjaannya lebih mudah. Meskipun demikian, masih banyak pemilik usaha dan penenun terampil yang bekerja di bidang tenun. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Wajo

sudah melaksanakan program dalam rangka pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera berupa pelatihan dan sosialisasi mengenai sutera. Pemberdayaan tersebut berupa pelatihan menenun, pelatihan pewarnaan dan sosialisai tetapi belum maksimal karena keterbatasan alat, narasumber, jadwal yang masih bertabrakan dengan kegiatan lain dan serta kurangnya dana untuk melakukan kegiatan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan Disperindagkop apa faktor penghambatnya serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan dan mengatasi hambatan yang ada.

1.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang pertama, penelitian Atima, Syaifuddin S. Kasim dan Dewi Anggraini (2019) dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Kain Tenun di Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi”. Persamaan penelitiannya adalah sama-sama membahas mengenai pemberdayaan dan metode penelitiannya juga menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus pada pemberdayaan perempuan pengrajin tenun dan penelitian yang akan penulis lakukan membahas pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera. Kedua, penelitian yang dilakukan Santy Permata Sari dan Maria Endang Jamu (2023) dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Tenun Ikat di Desa Potunggo Kabupaten Ende untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid 19”. Persamaan penelitiannya adalah membahas pemberdayaan dan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Perbedaannya pada kain tenunnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eko Budi Santoso, Reydonnizar Moenek, Annisa Rahmadanita dan Wahyu Ramdhani (2023) dengan judul “Pemberdayaan Usaha Mikro Pengrajin Tenun Ulap Doyo di Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara”. Memiliki persamaan pada pemberdayaan usaha dan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Perbedaannya pada jenis tenun yang dihasilkan.

Keempat, penelitian yang dilakukan Winwin Amelia, Syaefuddin, Lesi Oktiawanti dan Ahmad Hamdan (2019) (Amelia, Syaefuddin, & Hamdan, 2019) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kerajinan Kain Tenun Sutra Bermotif Kearifan Lokal”. Memiliki persamaan pada pemberdayaan masyarakat melalui kain tenun sutera. Perbedaannya pada pengembangan desa yang dilakukan.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Ativa Putridiani dan Yoyon Suryono (2019) dengan judul “Pemberdayaan Pengrajin Tenun di Desa Wisata Gamplong” persamaannya yaitu adanya proses pemberdayaan yang dilakukan pada pengrajin tenun dan perbedaannya pada pendekatan kualitatif metode studi kasus.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dimana penulis memfokuskan secara detail mengenai pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dari berbagai aspek dengan dianalisis menggunakan teori Pemberdayaan dari

Mardikanto dan Poerwoko (2019) yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan. Selanjutnya berfokus pada faktor yang menjadi penghambat serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera di Desa Pakkanna Kecamatan tanasitolo Kabupaten Wajo

1.5. Tujuan.

Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo. mendeskripsikan pemberdayaan yang dilakukan, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana berfokus pada pengamatan mendalam dan menyeluruh. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara yang terdiri dari Kepala Disperindagkop berjumlah 1 (Satu) Orang, Kepala Bidang pemberdayaan koperasi berjumlah 1 (satu) orang, staff pengelola distribusi dan pemasaran berjumlah satu orang, pengusaha dan Masyarakat pengrajin tenun sutera berjumlah 7 (Tujuh) Orang.

Dalam menganalisis hasil penelitian penulis menggunakan Teori Tingkat Pemberdayaan masyarakat terdapat 4 upaya kegiatan pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto dan Soebianto (2019) mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Bina Manusia adalah upaya yang pertama dan paling utama untuk dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain peningkatan kapasitas individu, peningkatan kapasitas entitas/lembaga dan peningkatan kapasitas sistem.
2. Bina Usaha merupakan aspek penting dari pemberdayaan masyarakat karena dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Bina Lingkungan berfungsi sebagai model untuk pengembangan masyarakat, masalah lingkungan dipandang penting bagi proses pembangunan. Analisis Manfaat dan Dampak Lingkungan Setiap Kegiatan Penanaman Modal (AMDAL) memandang kelestarian lingkungan alam dan sosial menjadi penentu keberlangsungan kegiatan investasi dan operasional, khususnya dalam hal pasokan bahan bak
4. Bina Kelembagaan digambarkan sebagai seperangkat pedoman yang dipatuhi oleh anggota masyarakat. Institusi memiliki kualitas yang berbeda-beda, antara lain berfungsi sebagai platform untuk kolaborasi dalam proses pencapaian tujuan, memiliki seperangkat aturan, kode etik, konsekuensi bagi pelanggar aturan, dan metode untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri tersebut menunjukkan pentingnya kelembagaan dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian dan pembahasan ini penulis akan menguraikan tentang pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada yaitu Bagaimana pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera yang dilakukan Disperindagkop di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Apa saja faktor penghambat dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. Selanjutnya data yang di peroleh tersebut di analisis dengan menggunakan Teori Pemberdayaan Masyarakat oleh Mardikanto dan Poerwoko sebagaimana penulis uraikan di bawah ini.

3.1. Pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Dalam menganalisis hasil penelitian penulis menggunakan Teori teori Pemberdayaan dari Mardikanto dan Poerwoko (2019) yaitu Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan

3.1.1. Bina Manusia

Pemerintah melakukan kegiatan, yaitu:

- Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (individu dan kelompok)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo melaksanakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi dengan tujuan masyarakat dapat mengerti tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas dari tenun yang di dihasilkan. Ada beberapa materi yang dibahas dalam kegiatan sosialisasi tersebut yaitu dokumen, modal, kode komoditas, dan peraturan yang terkait. Informasi lengkap juga dapat di akses pada web resmi Kementerian Perdagangan sehingga masyarakat dapat memperelajari ulang secara mandiri dan mendapat informasi lebih dari web resmi Kementerian Perdagangan dan artikel-artikel terkait yang ada di internet.

3.1.2. Bina Usaha

Kegiatan Bina usaha adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan bahan baku
Kain tenun sutera sendiri memiliki bahan utama yaitu benang sutera yang dihasilkan dari ulat sutera. Dulu di Desa Pakkanna ada kebun murbai untuk habitat ulat sutera. Namun saat ini di kampung tersebut hanya mengolah bahan baku sutera. Pemerintah melalui Dinas Perindagkop dalam hal menjaga ketersediaan bahan baku pemerintah mencoba untuk menjalin kerjasama dengan kabupaten lain yaitu Soppeng yang mana sebagai penghasil murbei, ulat sutera dan kepompong.
- b. Peningkatan aksebilitas modal
pemerintah memberikan pemberdayaan dengan solusi modal, ikut mengawasi dan memantau kerjasama dengan BNI dalam hal layanan KUR bagi masyarakat. Sebelumnya juga pernah memberikan bantuan berupa dana dan bantuan mesin jahit di setiap kelompok pelaku usaha tenun sutera. Bantuan tersebut cukup membantu para pelaku usaha kain tenun sutera dalam mengembangkan usahanya.
- c. Pengembangan jejaring dan pasar

Promosi dan pemasaran secara online dapat meningkatkan penjualan tenun sutera. Namun, dikarenakan masih terdapat kurangnya penguasaan dalam teknologi yang ada berdampak pada penyajian yang disuguhkan dalam e-commerce atau social media kurang sesuai dengan produk asli tenun sehingga diperlukan Kerjasama yang baik dari pelaku usaha dan seseorang yang ahli dalam bidang teknologi informasi untuk membantu dalam hal promosi dan pemasaran secara online

3.1.3. Bina Lingkungan

Kegiatan usaha atau industri perlu memperhatikan kelestarian lingkungan baik berdasar pada aspek fisik dan aspek sosial yang dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar.

a. Aspek fisik

Terkait dengan kelestarian lingkungan fisik adalah hal yang sangat diperhatikan karena dapat mempengaruhi sumber daya alam, lingkungan dan masyarakat sekitar. Pengrajin tenun sutera membuang 2 jenis limbah saat proses produksi. Pertama adalah limbah sisa kain atau sampah tekstil, sampah tersebut dikumpulkan dan langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. Kedua adalah limbah air bekas pewarnaan yang dapat langsung dibuang ke tanah atau di tampung dalam tempat seperti waduk dan bak, kemudian dapat disaring kotor terlebih dahulu atau di buang ke tanah lahan terbuka

b. Aspek sosial

Disperindagkop telah melakukan upaya di atas dalam rangka keberlanjutan produk dengan memberikan pelatihan untuk mencetak perajin baru dan meningkatkan kemampuan perajin yang ada sehingga mengurangi angka pengangguran di Desa Pakkanna.

3.1.4. Bina Kelembagaan

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Wajo tidak hanya pada bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan tetapi juga terdapat bina kelembagaan.

a. Komponen respon

Komponen person atau sumber daya manusia adalah komponen yang penting yang menunjang keberhasilan suatu pemberdayaan. Pada sebuah organisasi sumber daya manusia merupakan unsur pokok suatu organisasi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya. Kualitas sumber daya manusia yang ada juga harus bagus untuk kelancaran segala kegiatan yang sudah direncanakan.

b. Komponen kepentingan

Pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo tidak semata-mata hanya menjalankan tugas dan fungsi, tetapi juga terdapat kepentingan bersama untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo

c. Komponen Struktur

Dalam hal kelembagaan, Disperindagkop mulai menghimbau Desa Pakkanna dalam hal ini adalah perangkat desa yang ada untuk mengaktifkan kembali koperasi yang menaungi para pelaku usaha tenun sutera. Adanya koperasi akan memudahkan kami dalam melaksanakan program pemberdayaan untuk tenun sutera. Kami juga mengharapkan dengan adanya koperasi dapat membentuk kerjasama tim yang baik untuk keberlanjutan usaha tenun sutera dan untuk meningkatkan kualitas tenun sutera

3.2. Faktor-faktor penghambat pemberdayaan pengrajin tenun sutera oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Desa Pakkana Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Dalam proses pemberdayaan juga terdapat hal yang menjadi kendala atau penghambat. Oleh karena itu perlu diperhatikan dengan baik dan menjadi bahan evaluasi untuk program pemberdayaan di masa yang akan datang. Berikut faktor penghambat pemberdayaan pengrajin tenun sutera:

- Menurunnya minat kelompok milenial terhadap tenun sutera
Seiring dengan berkembangnya zaman jumlah perajin tenun sutera di Desa Pakkana mengalami penurunan padahal usaha kain tenun sutera membutuhkan perajin yang mengerti dan ahli dalam bidang menenun dan pewarnaan. Penurunan jumlah perajin tersebut diakibatkan oleh generasi milenial lebih tertarik dengan hal yang berkaitan dengan teknologi informasi yang dinilai lebih cepat, instan dan efisien meskipun secara turun-temurun dalam keluarganya mungkin sudah sangat erat kaitannya dengan tenun.
- Terbatasnya biaya
Dalam hal pemberdayaan pengrajin tenun sutera, Disperindagkop selalu berusaha melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Namun, kadang masih terdapat program yang belum bisa terealisasi dengan baik karena belum tersedianya anggaran untuk tahun 2024 ini, semua masih dirapatkan
- Terbatasnya bantuan modal
Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pengrajin tenun sutera terdapat kendala yang dihadapi pemerintah dalam hal regulasi dalam memberikan bantuan uang bagi para pelaku usaha. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo memiliki hambatan dalam memberikan bantuan berupa uang kepada pelaku usaha tenun sutera karena syarat yang menerima bantuan tersebut harus berbadan hukum dan status badan hukumnya minimal sudah 3 tahun. Mengingat bahwa pengrajin kain tenun sutera di Desa Pakkana tersebut mayoritas adalah usaha kecil atau usaha rumahan yang belum bersertifikat hukum.

3.3 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Desa Pakkana Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

Dalam kegiatan pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera tentu terdapat hambatan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Untuk mengatasi hambatan yang ada, maka pemerintah melakukan beberapa upaya dalam rangka pemberdayaan dan pelaksanaan tugas. Upaya-upaya yang dilakukan dapat sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia

Disperindagkop mengupayakan ada program pemerintah yang lebih mengenalkan kearifan lokal Kabupaten Wajo khususnya dalam hal ini tenun sutera agar para kelompok milenial tahu dan tertarik dengan budaya lokal yang sangat berpotensi bagi daerahnya bahkan negara. Banyak para pelaku usaha yang kehilangan perajinnya karena perajin tenun tersebut lebih memilih menjadi pegawai pabrik khususnya perajin yang masih muda atau dalam usia kerja produktif. Kami menginginkan tindakan dan kebijakan yang tegas dari pemerintah, seperti aturan atau syarat pekerja pabrik. Contohnya persyaratan dalam pembatasan umur pekerja pabrik jika batas umur semakin dikurangi jujur saja mungkin dapat membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan kembali perajinnya meskipun tidak sebanyak saat awal. Kemudian, perlunya pemerintah lebih gencar memperkenalkan kekayaan lokal Kabupaten Wajo di kalangan anak sekolah agar anak-

anak juga mengerti dan tertarik dengan kearifan lokal yang ada khususnya dalam hal ini tenun sutera

2. Biaya/modal

Biaya merupakan dana, anggaran, atau uang yang menjadi unsur penting yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Terdapat program-program yang kami susun untuk dilaksanakan khususnya di Bidang Industri yang berkaitan dengan pemberdayaan kain tenun sutera namun belum bisa terlaksana dikarenakan ketersediaan anggaran yang belum cukup memenuhi. Oleh karena itu, untuk ke depannya kami akan berusaha dan berupaya pada setiap penyusunan program kegiatan kami disusun dengan jelas dan memperhitungkan waktu dengan baik sehingga dapat diajukan dan dianggarkan dalam APBD demi terlaksananya kegiatan tersebut.

3. Regulasi

Disperindagkop melakukan upaya untuk memberikan fasilitas bagi para pelaku usaha tenun sutera dalam mendapatkan sertifikat berbadan hukum. Dorongan yang kami berikan berupa arahan untuk membentuk kelompok usaha yang mendapat izin dan surat keputusan atas izin pendirian kelompok usaha mereka. Kemudian kami meminta para pelaku usaha untuk melengkapi berkas fotokopi Kartu Tanda Penduduk untuk dibuatkan sertifikat berbadan hukum yang diserahkan kepada Disperindagkop kemudian diproses melalui akta notaris untuk diterbitkan sertifikat berbadan hukum

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Atima, Syaifuddin S. Kasim dan Dewi Anggraini (2019) dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Kain Tenun di Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi” mengungkapkan bahwa keikutsertaan masyarakat Desa Pajam yang sudah mulai berkurang dari segi pengelolaan, pemberian sumbangan berupa ide/pendapat serta tenaga. Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam pemberdayaan Perempuan pengrajin kain tenun yaitu masih kurangnya dana. Dalam penelitian yang dilakukan penulis bahwa di Desa Pakkanna dalam proses pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera juga kurang dalam hal partisipasi masyarakat. Dalam hal ini penulis juga mengungkapkan bahwa faktor penghambat dari pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera ini yaitu keterbatasan dana.

Penelitian yang dilakukan Santy Permata Sari dan Maria Endang Jamu (2023) dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Tenun Ikat di Desa Potunggo Kabupaten Ende untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid 19”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Tenun Ikat di Desa Potunggo Kabupaten Ende belum maksimal dan masyarakat kurang inisiatif dalam mengembangkan keterampilan sehingga tidak ada pengembangan ekonomi di desa tersebut. Penelitian tersebut sama halnya di Desa Pakkanna Kecamatan Tanasitolo dalam pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera dimana masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelatihan yang ada sehingga kurang meningkatnya keterampilan masyarakat, hal ini tidak dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang ada di Desa Pakkanna untuk memperbaiki perekonomian mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Budi Santoso, Reydonnizar Moenek, Annisa Rahmadanita dan Wahyu Ramdhani (2023) dengan judul “Pemberdayaan Usaha Mikro Pengrajin Tenun Ulap Doyo di Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya bantuan dana dengan persyaratan yang cukup rumit sehingga tidak semua pengrajin dapat mendapatkan dana bantuan tersebut. Sama halnya dengan yang terjadi pada penelitian penulis tentang pemberdayaan

pengrajin kain tenun sutera yang mana terdapat bantuan dana dengan syarat pengrajin harus memiliki usaha yang berbadan hukum dan minimal usaha sudah berjalan 5 tahun.

Penelitian yang dilakukan Winwin Amelia, Syaefuddin, Lesi Oktiwanti dan Ahmad Hamdan (2019) (Amelia, Syaefuddin, & Hamdan, 2019) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kerajinan Kain Tenun Sutra Bermotif Kearifan Lokal” yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik seperti kesempatan, kemauan, dan kemampuan untuk berpartisipasi. Adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yaitu dukungan dari pemerintah, koordinasi yang baik antar instansi, keterbukaan masyarakat terhadap hal-hal baru dengan faktor penghambat yaitu kuantitas SDM dan keterbatasan anggaran. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera sudah cukup dengan berbagai dukungan baik itu dari pemerintah maupun kerjasama antar masyarakat pengrajin kain tenun sekitar Kecamatan Pakkanna Kecamatan Tanasitolo. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ativa Putridiani dan Yoyon Suryono (2019) dengan judul “Pemberdayaan Pengrajin Tenun di Desa Wisata Gamplong” Hasil penelitian ini partisipasi masyarakat Desa Wisata Gamplong sudah ada sudah cukup baik, seperti ikut hadir dalam pelatihan dan sosialisasi walaupun masih ada yang tidak bisa ikut hadir karena faktor. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa masyarakat di Pakkanna Kecamatan Tanasitolo bahwa kehadiran dan keaktifan mereka dalam kegiatan pelatihan dan sosialisasi masih kurang tetapi masih ada keaktifan masyarakat yang hadir dengan dalam memberikan kritik dan saran atau masukan selama kegiatan pelatihan dan sosialisasi.

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa pemberdayaan dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemberdayaan dan program yang diinginkan akan benar-benar selesai dan terwujud serta masyarakat akan segera merasakannya. Namun demikian, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam proses perencanaan program pemberdayaan dengan keterampilan komunikasi yang efektif dan dapat dipahami oleh semua kelompok umur di masyarakat serta kolaborasi antara berbagai pihak seperti pemerintah, dan masyarakat lokal dapat menciptakan sinergi yang kuat.

IV. KESIMPULAN

1. Pemberdayaan Pengrajin Kain Tenun Sutera oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo sudah dilaksanakan namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari teori Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto 2019 yang terdapat 4 (empat) bina yaitu:
 - Bina Manusia: masih terdapat masyarakat yang belum mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang diadakan Disperindagkop mengenai tenun sutera.
 - Bina Usaha: masih banyak pelaku usaha yang memasok bahan baku dari luar daerah, kurangnya bantuan modal seperti peralatan tenun, terkendala dalam pemberian modal secara tunai akibat regulasi berbadan hukum, dan kurangnya promosi.
 - Bina Lingkungan: banyak pelaku usaha yang belum mengerti bahayanya membuang limbah air bekas pewarnaan tenun sutera langsung ke tanah
 - Bina Kelembagaan: koperasi dan kelompok organisasi masyarakat yang kurang aktif
2. Terdapat faktor penghambat pemberdayaan pengrajin kain tenun sutera di Desa Pakkanna

Kecamatan Tanasitolo

- Kurangnya minat kelompok milenial terhadap kerajinan kain tenun sutera
 - Terbatasnya modal yang di berikan oleh pemerintah seperti pemerintah sudah tidak memberikan bantuan alat produksi
 - Terbatasnya anggaran dan masih terdapat beberapa program yang belum terlaksana karena kurangnya anggaran.
3. Terdapat upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo dalam mengatasi hambatan dalam pemberdayaan kain tenun sutera yaitu:
- Pelaksanaan pelatihan, sosialisasi dan event lain yang berkaitan dengan kearifan lokal mulai digerakkan lagi untuk mengenalkan dan melestarikan kekayaan daerah.
 - Pada penyusunan program kegiatan lebih teliti dan disusun dengan jelas memperhitungkan waktu dengan baik sehingga dapat diajukan dan dianggarkan dalam APBD agar kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana.
 - Bekerjasama dengan pemerintah Desa Pakkanna mengenai pembuatan sertifikat usaha para pelaku usaha tenun sutera agar usaha yang dikelola berbadan hukum.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kecamatan tanasitolo Kabupaten Wajo saja sebagai model studi kasus yang di pilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan untuk Pemerintah Kabupaten Wajo memberikan bentuk dukungan berupa bantuan dana dan bantuan pengadaan alat atau fasilitas yang berhubungan dengan pengembangan kain tenun sutera. Hal ini perlu untuk dilakukan karena nantinya dapat mencegah agar masyarakat tidak jenuh sehingga semangat dan tetap memberdayakan kain tenun sutera.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepala Disperindakop, Kabid Koperasi, staff Pengelola distribusi dan Perwakilan Pengusaha dan Masyarakat pengrajin yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Edi Suharto, 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Winwin dkk(2019) *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kerajinan Kain Tenun Sutra Bermotif Kearifan Lokal*. Unsil
- Tambunan, T. (2000). *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Salemba

Empat.

Tikson, D. T. (2005). *Modul Teori Pembangunan*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Totok, Mardikanto., & Poerwoko, S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta..

Jurnal dan Karya Ilmiah

Santy Permata Sari dan Maria Endang Jamu (2023) *Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Tenun Ikat di Desa Potunggo Kabupaten Ende untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid 19*

Eko Budi Santoso, Reydonnizar Moenek, Annisa Rahmadanita dan Wahyu Ramdhani (2023) *Pemberdayaan Usaha Mikro Pengrajin Tenun Ulap Doyo di Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara*”, Indonesia1

Atima, dkk(2019) *Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Kain Tenun di Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi*

Siti Ativa Putridiani dan Yoyon Suryono (2019) *Pemberdayaan Pengrajin Tenun di Desa Wisata Gamplong*. Management Journal

Permata S. & Jamu E.(2023) *Pemberdayaan Perempuan Pengrajin Tenun Ikat di Desa Potunggo Kabupaten Ende untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Masa Pandemi Covid 19*

Perturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

